

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran XXVI



DINAS PERHUBUNGAN



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 303 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;

c. Bab III : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

d. Bab IV : Penutup.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
- m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
- v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang diatur oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015.

Selain sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk satu tahun anggaran, dokumen ini juga menjadi dasar Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, RKPD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
- c. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Salatiga, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga, yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan melalui upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, melakukan perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, untuk

selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025 dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 96 Tahun 2015 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Angkutan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Daerah;

27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025; dan
30. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

- a. Penyesuaian kebutuhan atas perkembangan atas prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dengan:
 - 1) Asta Cita Misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, atas Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Visi Presiden *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*;
 - 2) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah, yang mengacu pada RPD sebagai masa transisi perencanaan Pembangunan daerah, maka kebijakan Pembangunan diarahkan pada *“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”*
 - 3) Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025, yaitu *“Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri”*;
 - 4) Visi Misi Wali Kota Salatiga Tahun 2025-2029 terpilih, yaitu *“Terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Yang Mendunia.”*
- b. Penyesuaian perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga agar dapat lebih responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), terpadu, inovatif, kreatif, dengan pendekatan *money follow programme* dan *programme follow result*, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam

percepatan perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

- c. Proses perubahan penetapan kegiatan tahunan dari indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta cara mencapai tujuan dan sasaran.

2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan sinergitas, sinkronisasi dan integritas bagi perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan.
- b. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang kredibilitas dalam rangka mencapai Tata Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- c. Penyesuaian perubahan atas penetapan kegiatan tahunan dari indikator kinerja.
- d. Menetapkan perubahan atas prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja triwulan II pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, kebutuhan, peluang dan kendala yang ada serta cara mencapai tujuan dan sasaran.
- e. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025.
- f. Menjamin keterkaitan perubahan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga.
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Salatiga.
- 2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga. Rumusan Rencana program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan tersebut ditampilkan pada tabel yang berisikan kode, urusan, bidang urusan pemerintah daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif.

BAB IV Penutup

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan selama lima tahun mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026. Sasaran strategis tersebut antara lain:

1. Tujuan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Indikator:

- a. Rasio Konektivitas Kota.
- b. Kinerja Lalu Lintas Kota.

2. Sasaran

Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Indikator:

- a. Rasio Izin Trayek.
- b. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.
- c. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum.

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga periode Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 dan berdasarkan hasil Evaluasi RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2025, Dinas Perhubungan melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan baik.

Secara umum, realisasi capaian program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terdapat satu kegiatan dengan satu sub kegiatan yang tidak dapat direalisasikan seluruhnya dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan di lapangan, yaitu sub kegiatan **"Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"** pada kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Target kinerja berupa tiga unit sewa bus, hanya terlaksana 2 unit, hal ini dikarenakan kebutuhan atas satu unit bus bagi Forkompinda pada acara silaturahmi Idul fitri 1446 Hijriah ke Gubernur Jateng, sudah terpenuhi oleh Bagian Umum

Setda Kota Salatiga. Selebihnya, beberapa sub kegiatan diberlakukan perubahan dan penyesuaian anggaran guna optimalisasi anggaran dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan organisasi, baik kebutuhan yang bersifat internal maupun eksternal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar capaian Program/ nKegiatan Dinas Perhubungan Kota Salatiga sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025, tercapai, sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2025 maupun Renstra 2023-2026. Capaian ini dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin di Dinas Perhubungan Kota Salatiga untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi, dan adaptif terhadap perkembangan tuntutan maupun kebutuhan masyarakat dan organisasi; dan
2. Kapasitas SDM di Dinas Perhubungan Kota Salatiga cukup mendukung terhadap pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang perlu dilakukan Dinas Perhubungan Kota Salatiga ke depan adalah:

1. Menjaga komitmen, sikap adaptif, dan responsibilitas yang sudah baik tersebut agar konsisten menunjukkan peningkatan yang positif dalam melaksanakan tupoksi urusan perhubungan secara optimal mengingat senantiasa adanya perubahan atas kebijakan anggaran yang diberlakukan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi, kreatifitas, dan eksekusi yang lebih efektif dan efisien lagi untuk mencapai dan meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga;
3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan, SPIP; dan
4. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung.

Review terhadap Renstra yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Salatiga adalah perbandingan antara Renstra dengan hasil analisis kebutuhan apakah sudah sesuai dengan target atau belum. Secara garis besar, sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan berdasarkan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025 terhadap target Renstra Tahun 2025, mengalami beberapa perubahan, yaitu:

Tabel II.1
Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKPD Tahun 2025

Jenis	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	Keterangan
Program	2	2	Tidak berubah
Kegiatan	14	14	Penambahan 2 kegiatan, dan pengurangan 1 sub kegiatan
Sub Kegiatan	36	34	Penambahan 4 sub kegiatan, dan pengurangan 3 sub kegiatan.

Pengurangan atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan pada PRKPD Tahun 2025 berdasarkan target Renstra Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Pengurangan Kegiatan dan Subkegiatan RKPD Tahun 2025

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan	Alasan Perubahan
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya 1 unit halte, dan 1 unit terminal barang.	Keterbatasan anggaran, dan skala kebutuhan penyelenggaraan LLAJ.
2.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).	Penataan dan rehab 1 unit Terminal Tamansari.	Keterbatasan anggaran, dan skala kebutuhan penyelenggaraan LLAJ.
3.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/Kota.	1 laporan survei pendataan aset, dan 1 laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan Parkir	Keterbatasan anggaran, dan skala kebutuhan penyelenggaraan LLAJ.

Meskipun bukan merupakan target Renstra Tahun 2025, namun beberapa kegiatan dan sub kegiatan di bawah ini yang ditambahkan pada PRKPD Tahun 2025 masih merupakan target Renstra 2023-2026. Dianggarkan kembali dikarenakan di tahun-tahun sebelumnya, belum direalisasikan. Sehingga, hal ini merupakan langkah upaya Dinas Perhubungan dalam pencapaian target akhir Renstra tersebut. Penambahan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan pada PRKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3

Penambahan Kegiatan dan Subkegiatan RKPD Tahun 2025

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan	Alasan Perubahan
1.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	1 unit gedung kantor, meliputi pemeliharaan dapur, pintu Gedung pengujian kendaraan bermotor, dan pagar kantor.	Bukan target Renstra pada tahun 2025, namun target tahun 2023 yang belum dilaksanakan dikarenakan prioritas kebutuhan dan penyesuaian pagu anggaran.
2.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1 unit alat uji lampu kendaraan bermotor.	Tidak ada di agenda Renstra namun alat tersebut butuh diperbarui guna akurasi hasil uji dikarenakan sudah melebihi umur teknis.
3.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.	1 laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, berupa pekerjaan Operasi Laik Jalan sebanyak 10 kali.	Pekerjaan rutin dalam Program Penyelenggaraan LLAJ yang mengalami perubahan nomenklatur.
4.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2 unit bus untuk program Mudik Gratis pada masa Angkutan Lebaran 1446 H.	Pekerjaan rutin dalam Program Penyelenggaraan LLAJ yang mengalami perubahan nomenklatur.

Secara detail, rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga s.d. Triwulan II Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel E.81 berikut ini:

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Salatiga
Periode Pelaksanaan: Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga yang mengacu pada sasaran RKPD:

- 1. Rasio Konektivitas Kota
- 2. Kinerja Lalu Lintas Kota
- 3. Rasio izin Trayek
- 4. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
- 5. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			28,201,120,800		11,819,601,590		11,169,289,413		5,199,708,755		10,661,971,890										Dinas Perhubungan	
I.	Meningkatnya keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			24,505,372,000		5,600,552,808		6,614,202,265		1,561,146,686		3,394,807,156					4,955,953,842		10,556,506,650		17,530,939,325		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84.28 %	84.33		84.72		84.23		84.23		89.32					84.23		100		84.92			

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
A	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	12 Bulan	48.00	37,450,000	12	12,224,000	12	7,500,000	3	1,812,400	6	4,996,260					3	1,812,400	15	14,036, 400	0.31	0.37	
1	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	9 Laporan	28.00	37,450,000	9	12,224,000	7	7,500,000	3	1,812,400	6	4,996,260					3	1,812,400	12	14,036, 400	0.43	0.37	
B	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat.	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	84.28 %	NA	18,749,909 ,654	NA	4,306,695,5 09	100	4,703,254, 000	84.23	1,236,352, 007		2,755,245,4 73					84.2 3	1,236,352, 007	#VA LUE!	5,543,0 47,516	#VA LUE!	0.30	
2	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	49 Orang/ Bulan	158.00	18,623,565 ,654	38	4,276,029,5 09	39	4,577,860, 358	49	1,229,242, 007	49	2,748,135,4 73					49	1,229,242, 007	87	5,505,2 71,516	0.55	0.30	
3	Tercapainya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	1 Dokumen	4.00	126,344,00 0	1	30,666,000	1	22,500,000	0.25	7,110,000	0.5	7,110,000					0.25	7,110,000	1	37,776, 000	0.31	0.30	
C	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat.	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	84.28 %	NA	100,000,00 0	NA	17,062,750	100	34,351,020	84.23	15,402,017		15,402,017					84.2 3	15,402,01 7	#VA LUE!	32,464, 767	#VA LUE!	0.32	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
4	Tercapainya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	Sub Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	2 Dokumen	4.00	100,000,000	1	17,062,750	2	34,351,020	1	15,402,017	1	15,402,017					1	15,402,017	2	32,464,767	0.50	0.32	
D	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat.	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	84.28 %	NA	400,000,000	NA		100	228,753,000	84.23	-		80,173,200					84.23	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	
5	Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	60 Paket	920.00	400,000,000	380	113,487,000	460	228,753,000	0	-	60	80,173,200					0	-	380	113,487,000	0.41	0.28	
E	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.	84.28 %	NA	938,859,846	NA	258,917,216	100	419,348,562	84.23	80,319,100		111,289,680					84.23	80,319,100	#VALUE!	339,236,316	#VALUE!	0.36	
6	Tercapainya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	1 Paket	3.00	22,000,000	1	4,995,700	1	7,386,000	1	4,915,400	1	4,915,400					1	4,915,400	2	9,911,100	0.67	0.45	
7	Tercapainya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	1 Paket	4.00	25,591,000	1.00	5,425,700	1	6,000,000	1	10,901,000	1	10,901,000					1	10,901,000	2	16,326,700	0.50	0.64	
8	Tercapainya Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	1 Paket	4.00	148,500,000	1	36,293,800	1	61,983,400	0.5	36,247,300	0.69	39,729,600					0.5	36,247,300	2	72,541,100	0.38	0.49	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
9	Tercapainya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	1 Paket	4.00	296,759,90 0	1	75,508,200	1	155,271,66 2	0.25	3,774,400	0.55	14,187,300					0.25	3,774,400	1	79,282, 600	0.31	0.27	
10	Tercapainya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan.	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan.	730 Dokumen	1460.0 0	4,440,000	365	1,068,000	365	1,650,000	91	277,500	182	462,500					91	277,500	456	1,345,5 00	0.31	0.30	
11	Tercapainya Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu.	1 Laporan	48.00	30,170,000	12	6,735,000	12	7,057,500	0.25	1,998,000	0.5	4,183,000					0.25	1,998,000	12	8,733,0 00	0.26	0.29	
12	Tercapainya Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	1 Laporan	48.00	346,398,94 6	12	128,890,81 6	12	180,000,00 0	0.25	22,205,500	0.5	36,910,880					0.25	22,205,50 0	12	151,09 6,316	0.26	0.44	
F	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat.	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	84.28 %	NA	870,000,00 0	NA	-	100	186,945,20 0	84.23	38,467,800		38,467,800					84.2 3	38,467,80 0	#VA LUE!	38,467, 800	#VA LUE!	0.04	
13	Tercapainya Pengadaan Mebel.	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel.	40 Unit	5.00	30,000,000	0	-	13	23,095,200	13	38,467,800	13	38,467,800					13	38,467,80 0	13	38,467, 800	2.60	1.28	
14	Tercapainya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	NA	5.00	50,000,000	0	-	14	163,850,00 0	0	-	0	-					0	-	0	-	-	-	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
G	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat.	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	84.28	NA	1,888,704,800	NA	615,452,872	1	547,677,342	84.23	151,104,442		324,795,606					84.23	151,104,442	#VA LUE!	766,557,314	#VA LUE!	0.41	
15	Tercapainya Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	1 Laporan	12.00	9,200,000	12	2,000,000	12	2,200,000	1	2,000,000	1	2,000,000					1	2,000,000	13	4,000,000	1.08	0.43	
16	Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	1 Laporan	12.00	419,997,800	12	132,677,589	12	70,800,000	0.25	15,302,530	0.5	29,693,772					0.25	15,302,530	12	147,980,119	1.02	0.35	
17	Tercapainya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	1 Laporan	4.00	69,352,000	2	34.494.750	0	-	0	-	1	29,657,250					0	-	2	#VALUE!	0.50	#VALUE!	
18	Tercapainya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1 Laporan	1.00	1,390,155,000	1	446,280,533	1	474,677,342	0.25	133,801,912	0.5	263,444,584					0.25	133,801,912	1	580,082,445	1.25	0.42	
H	NA	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	NA	NA	1,520,447,700	NA	276,713,461	100	347,403,283		37,688,920		64,437,120					n	37,688,920	#VA LUE!	314,402,381	#VA LUE!	0.21	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
19	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	4 Unit	16.00	332,595,80 0	4	83,551,195	4	84,992,800	4	23,631,420	4	33,326,420					4	23,631,42 0	8	107,18 2,615	0.50	0.32	
20	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	30 Unit	28.00	198,750,00 0	7	123,493,71 6	5	112,501,44 5	6	6,862,500	7	20,225,700					6	6,862,500	13	130,35 6,216	0.46	0.66	
21	Tercapainya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	2 Unit	4.00	801,824,00 0	1	45,559,050	1	126,539,03 8	0	-	0	-					0	-	1	45,559, 050	0.25	0.06	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
22	Tercapainya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	23 Unit	4.00	99,999,900	1	24,109,500	22	23,370,000	23	7,195,000	23	10,885,000					23	7,195,000	24	31,304,500	6.00	0.31	
23	Tercapainya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	1 Unit	1.00	100,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	-	-	
I.	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat.	Kegiatan: Penataan Organisasi.	84.28	NA	NA	-		NA	289,879,000	84.23	-	0	-					84.23	-	#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!	
24	Tercapainya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Sub Kegiatan: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	1 Dokumen	NA	NA	-		2.00	241,863,500	0	-	0	-					0	-	#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!	
	Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			3,695,748,800		6,219,048,782		4,555,087,148	0	3,638,562,069		7,267,164,734					0	3,638,562,069	0	9,857,610,851	#DIV/0!	6,776,679,825.50	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
		Persentase Rambu Terpasang	89 %	95		77		83		83		87					83	-	160	-	1.68	#DIV/0!		
		Persentase layanan angkutan darat	46 %	29		27.5		27.53		27.53		27.53					27.53	-	55	-	1.90	#DIV/0!		
J	Tercapainya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota.	NA %	NA	NA	NA	683,869,000	100	449,470,440	0	118,636,000		242,910,500				0	118,636,000	#VALUE!	802,505,000	#VALUE!	#VALUE!		
25	Tercapainya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota.	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota.	1 Dokumen			0	-	1	46,835,340	0.3	-	0.6	-				0.3	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
26	Tercapainya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota.	Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota.	1 Dokumen	8.00	100,000,000	0	-	1	73,359,800	0.25	35,565,000	0.5	47,465,000				0.25	35,565,000	0	35,565,000	0.03	0.36		
27	Tercapainya Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota.	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota.	1 Laporan	12.00	515,000,000	3	683,869,000	3	329,275,300	0.25	83,071,000	0.5	195,445,500				0.25	83,071,000	3	766,940,000	0.27	1.49		

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
K	Tercapainya Penyediaan Perlengkapa n Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a.	89 %	NA	NA	NA	98,393,500	100.0 0	225,508,46 2	0	2,688,528, 371		5,413,093,5 26					0	2,688,528, 371	#VA LUE!	2,786,9 21,871	#VA LUE!	#VALU E!	
28	Tercapainya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.	70 Unit	4.00	70,000,000	1	98,393,500	2.00	225,508,46 2	17	2,688,528, 371	35	5,413,093,5 26					17	2,688,528, 371	18	2,786,9 21,871	4.50	39.81	
29	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota.	Sub Kegiatan: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	2 Unit	5	65,000,000	0	-	0.00	-	0	-	0	-					0	-	0	-		-	
L	Tercapainya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.	NA %	NA	90,000,000	0	-	100	47,984,236	0	-	0	-					0	-	0	-	#VA LUE!	-	
30	Tercapainya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).	1 Unit	3.00	90,000,000	0	-	2	47,984,236	0	-	0	-					0	-	0	-	-	-	
M	Tercpainya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	NA %	NA	NA		1,558,037,3 00	100	624,532,50 0	35	336,780,00 0		387,088,00 0					35	336,780,0 00	35	1,894,8 17,300	#VA LUE!	#VALU E!	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
31	Tercapainya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1 Unit	4.00	460,871,80 8	1	1,419,727,3 00	2	551,629,80 0	1	336,780,00 0	1	336,780,00 0					1	336,780,0 00	2	1,756,5 07,300	0.50	3.81	
32	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Sub Kegiatan: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1000 Paket dokumen	16000	200,000,00 0	1000	25,000,000	0	-	0	-	1000	25,000,000					0	-	1000	25,000, 000	0.06	0.13	
33	Tercapainya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	8 Unit	39.00	260,000,00 0	9	86,310,000	13	72,902,700	0	-	8	25,308,000					0	-	9	86,310, 000	0.23	0.33	
N	Tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota.	NA %	NA	NA	NA	1,185,919,8 78	100	3,131,501, 360	33	491,257,69 8		1,184,232,7 08					33	491,257,6 98	#VA LUE!	1,677,1 77,576	#VA LUE!	#VALU E!	
34	Tersosialisasi nya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	Sub Kegiatan: Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	1 Dokumen	6.00	77,338,008	0	-	0	-	0.25	5,428,800	0.5	6,328,800					0.25	5,428,800	0	5,428,8 00	0.04	0.07	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
35	Tercapainya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	1 Dokumen	NA	379,000,00 0	4	856,774,69 0	12	2,759,615, 600	0.25	409,180,00 0	0.5	1,032,845,5 00					0.25	409,180,0 00	4	1,265,9 54,690	#VA LUE!	3.34	
36	Tercapainya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota.	Sub Kegiatan: Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	1 Laporan	4.00	207,809,98 4	1	329,145,18 8	3	371,885,76 0	0.25	76,648,898	0.5	145,058,40 8					0.25	76,648,89 8	1	405,79 4,086	0.31	1.95	
37	Tercapainya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/Kota.	Sub Kegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/Kota.	2 Laporan	2	62,626,000	0	-	0.00	-	0	-	0	-					0	-		-		-	
O	Tercapainya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	NA %	NA	NA	NA	198,804,25 0	100		0	-	0	-					0	-	#VA LUE!	198,80 4,250	#VA LUE!	#VALU E!	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
38	Tercapainya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	NA Dokumen	2.00	30,000,000	1	-	1	40,149,450	0	-	0	-					0	-	1	-	0.50	-	
39	Tercapainya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	NA Dokumen	3.00	87,103,000	0.00	198,804,250	1	35,941,000	0	-	0	-					0	-	0	198,804,250	-	2.28	
P	Tercapainya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3,360,000		3,840,000					0	3,360,000	0	3,360,000	#VALUE!	#VALUE!	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
40	Tercapainya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota.	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraa n Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.	1 Laporan	NA	NA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.25	3,360,000	0.5	3,840,000					0.25	3,360,000	0	3,360,000	#VALUE!	#VALUE!	
Q	Tercapainya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	29 %	NA	NA	2.00	36,000,000	2.00	36,000,000	0	-		36,000,000					0	-	2	36,000,000	#VALUE!	#VALUE!	
41	Tercapainya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Sub Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	3 Unit	NA	NA	2	36,000,000	2	36,000,000	0	-	2	36,000,000					0	-	2	36,000,000	#VALUE!	#VALUE!	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Dishub pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dishub s.d. Renja Dishub Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dishub Tahun 2024 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dishub yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dishub s.d. Tahun 2025		Unit Perang -kat Daerah Penang -gung jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(6+12)		(14)=(13/5)x100%		(15)
Rata-Rata/ Jumlah				69.44	24,505,372 ,000 100	63.07	5,600,552,8 08	64.92	6,614,202, 265 100	Rata-Rata						64.9 2	4,297,257, 956	105.0 1	4,928,8 05,462. 96	151.2	12,153, 809,57 5.25			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						100	64.97	161.7 5	4,928,8 05,462. 96	217.76	183.75			
										Predikat						SANGAT TINGGI	RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025, disajikan dalam tabel e.70 ini:

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Perhubungan Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√		-	-
2	Pengolahan data dan informasi.	√		-	-
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√		-	-
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√		-	-
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√		-	-
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√		-	-
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√		-	-
8	Perumusan tujuan dan sasaran.	√		-	-
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√		-	-
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√		-	Yang melaksanakan, Bappeda.

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√		-	Keterbatasan anggaran menyebabkan belum semua usulan program dan kegiatan hasil musrenbang terakomodir.
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√		-	-
10.c	Menyinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			Dilaksanakan Bappeda.
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.		√	-	Program prioritas Wali Kota Salatiga, salah satunya "Mengurangi kemiskinan" namun, program kegiatan Dishub berdasarkan pendanaan, program, dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif, belum ada yang sesuai.
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	-	-

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√	-	-	-
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	-	-
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	√	-	-	-

Analisis kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan adalah capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, IKK maupun IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2024 dan capaian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.4
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan s.d. Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra Dinas Perhubungan			Realisasi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025*	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 (s.d. Tw I)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(14)
1	Rasio Izin Trayek	Rasio	-	24.37	24.37	21.87	21.87	23.59	23.48	Tingkat capaian 107,36%
2	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	-	24.79	24.79	22.79	22.79	19.49	19.21	Tingkat capaian 84,29%
3	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	60	82	82	83	83	75.44	25	Tingkat capaian 30,12%
4	Rasio Konektivitas Kota	Rasio	<1	0.71	0.71	0.88	0.71	0.88	0.88	Tingkat capaian 100%
5	Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	<1	0.4	0.4	0.31	0.5	0.31	0.30	Tingkat capaian 102,58%

Keterangan:

*Sesuai dengan perubahan target 2025 terbaru.

Penjelasan serta analisis atas kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek adalah ukuran yang membandingkan jumlah izin trayek angkutan umum yang dikeluarkan dalam satu tahun dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Rasio ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana layanan angkutan umum memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melihat perbandingan ketersediaan kendaraan umum terhadap jumlah orang yang dilayani. Rasio ini menjadi salah satu alat penting dalam pengelolaan transportasi, karena data ini menunjukkan tingkat pelayanan transportasi terhadap masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan terkait sektor transportasi di suatu daerah. Tidak ada nilai standar tunggal untuk capaian minimal ini, karena ia ditentukan secara lokal oleh masing-masing pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, berdasarkan analisis kebutuhan dan kondisi wilayah mereka.

Rasio ini dapat digunakan untuk membandingkan tingkat pelayanan transportasi di suatu daerah, dan atau untuk memantau perkembangannya dari tahun ke tahun sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rasio izin trayek adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Izin Trayek} = \frac{\text{Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Atas hal tersebut, maka formulasi Rasio Izin Trayek yang Dinas Perhubungan tetapkan adalah, *“Jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk”*. Target Renstra Tahun 2025 adalah sebesar 21,87, s.d. Triwulan II dengan menggunakan data jumlah penduduk per tahun 2025 semester I, terealisasi sebesar 23,48 dengan tingkat capaian 107,36%. Rinciannya sebagai berikut:

Rasio Izin Trayek	=	$\frac{\text{Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$
	=	$\frac{468}{199.350}$
	=	23,48

Target atas rasio izin trayek pada periode Renstra 2023-2026 ini bersifat non-kumulatif. Beberapa permasalahan perihal Rasio Izin Trayek adalah:

- 1) Banyaknya angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek antara lain disebabkan rendahnya kesadaran, kendaraan melebihi batas teknis usia kendaraan, rute trayek yang sudah tidak aktif.
- 2) Trayek angkutan belum memenuhi semua kebutuhan mobilisasi orang dan barang.
- 3) Pertambahan jumlah penduduk tidak diiringi dengan kenaikan minat Masyarakat menggunakan angkota umum,
- 4) load factor angkota hanya 15,46%.
- 5) Meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan angkutan umum.
- 6) Meningkatkan kesadaran operator layanan angkutan.

Tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Raperda LLAJ untuk mengganti Perda No 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan LLAJ yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- 2) Mengidentifikasi karakteristik pola pergerakan transportasi di wilayah Kota Salatiga dan jumlah penduduk potensial yang melakukan pergerakan serta permintaan transportasi.
- 3) Sosialisasi dan pendampingan penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Standar Pelayanan Angkutan Umum.
- 4) Kolaborasi dengan Kepolisian untuk melaksanakan pengawasan administrasi dan teknis termasuk Izin Trayek.

b. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak kendaraan yang dapat dilayani oleh setiap kilometer jalan di suatu wilayah. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah kendaraan dengan panjang jalan dalam kilometer. Nilai rasio

yang lebih tinggi menunjukkan bahwa jalan tersebut melayani lebih banyak kendaraan per kilometer, yang bisa mengindikasikan, memberikan gambaran tentang seberapa padat suatu wilayah dengan kendaraan berdasarkan panjang jalan yang tersedia melalui tingkat penggunaan jalan yang lebih tinggi atau potensi kepadatan lalu lintas. Rasio ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan jalan dan mengidentifikasi potensi masalah kemacetan di suatu wilayah. Meskipun rasio ini memberikan informasi tentang penggunaan jalan, perlu diingat bahwa rasio ini tidak memperhitungkan bobot jenis kendaraan dan tidak selalu mencerminkan kepadatan lalu lintas secara akurat. Lebih akurat dengan menggunakan pengukuran kinerja lalu lintas.

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan pada target ini adalah “Panjang jalan dibagi jumlah kendaraan”. Dengan menggunakan data panjang jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga, dengan data jumlah kendaraan yang berasal dari website Korlantas POLRI pada data per tanggal 14 Juli 2025, target pada tahun 2025 sebesar 24,79%, terealisasi sebesar 19,21% dengan tingkat capaian sebesar 84,29%. Berikut rinciannya:

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	=	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$
	=	$\frac{337,47}{175.635}$
	=	19,21

- Target atas rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada periode Renstra 2023-2026 ini bersifat non-kumulatif. Beberapa permasalahan perihal Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan adalah:
- 1) Batas teknis usia maksimal angkutan umum.
 - 2) Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan atau angkutan berbasis online.
 - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum.
 - 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan tanggung jawab dalam menggunakan kendaraan dan beralih ke angkutan umum.

Tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

- 2) Meningkatkan minat Masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dengan subsidi naik angkutan umum.
- 3) Evaluasi rute jaringan trayek angkutan umum yang terintegrasi.
- 4) Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini untuk menumbuhkan minat menggunakan angkutan umum dan keselamatan berlalu lintas.
- 5) Mendorong koperasi/pengusaha angkutan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar memenuhi standar pelayanan minimal angkutan umum.
- 6) Bekerjasama dengan Kepolisian dan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan pelajar agar anak yang dibawah umur (belum memiliki SIM) tidak menggunakan kendaraan pribadi.

c. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum" adalah indikator kinerja yang mengukur proporsi atau persentase kendaraan angkutan umum yang memiliki dan telah melakukan uji KIR (Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor) secara legal. Hasil ini menunjukkan tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap peraturan uji KIR, yang merupakan tanda kelayakan teknis kendaraan untuk beroperasi di jalan raya, yang diwajibkan oleh pemerintah untuk memastikan keselamatan transportasi.

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengertian Jumlah Uji KIR Angkutan Umum adalah:

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	=	Pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
------------------------------	---	---

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rumus Pesentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum adalah sebagai berikut:

Persentase
Kepemilikan
KIR Angkutan
Umum

=

Jumlah Angkutan Umum yang Tidak
Memiliki KIR pada Tahun n

Jumlah Angkutan Umum pada Tahun n

X 100%

Dinas Perhubungan Kota Salatiga, menentukan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum yang dalam hal ini angkutan perkotaan adalah, *“Jumlah angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dibagi total kendaraan angkutan umum yang ada”*. Hal ini diformulasikan untuk mengukur tingkat ketaatan pemilik kendaraan bermotor wajib uji. Standar nasional dari persentase kendaraan angkutan umum yang melakukan uji KIR adalah 60%. Tingkat kepemilikan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar angkutan umum yang beroperasi telah teruji kelayakannya, yang berdampak positif pada keselamatan dan kenyamanan.

Pada tahun 2025, Kota Salatiga menetapkan target sebesar 83%, dan sampai dengan triwulan II, berprogres terealisasi sebesar 25% atau dengan tingkat capaian sebesar 30,12%. Masa laik jalan yang berlaku 6 bulan sejak dinyatakan lulus uji, dan baru dinyatakan memiliki KIR ketika dinyatakan lulus uji, menyebabkan capaian persentase kepemilikan KIR secara utuh baru dapat dilihat di akhir tahun, dikarenakan target tersebut merupakan target tahunan, tidak terbagi dalam triwulan. Berikut rincian atas realisasi tersebut:

Persentase
Kepemilikan
KIR Angkutan
Umum

=

Jumlah Angkutan Umum yang Memiliki
KIR pada Tahun n

Jumlah Angkutan Umum pada Tahun n

X 100%

=

79

316

X 100%

=

25%

Target atas persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada periode Renstra 2023-2026 ini bersifat non-kumulatif. Beberapa permasalahan perihal Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran kepatuhan para pengusaha angkutan umum untuk melakukan uji KIR.

- 2) Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penindakan pelanggaran (*reward and punishment*).
- 3) Terwujudnya sistem manajemen keselamatan angkutan umum.
- 4) Penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Update data administrasi kendaraan Angkutan Umum.
- 2) Membuat SMS Gateway untuk mengingatkan waktu pelaksanaan Uji KIR Angkutan Umum.
- 3) Kolaborasi dengan Kepolisian untuk melaksanakan pengawasan masa berlaku Uji KIR.
- 4) Kolaborasi dengan Organda, paguyuban angkota untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas.
- 5) Peremajaan, Pemeliharaan, dan kalibrasi alat uji untuk meningkatkan pelayanan dan keakuratan hasil uji.

d. Rasio Konektivitas Kota

Rasio Konektivitas Kota adalah suatu ukuran tingkat aksesibilitas dan keterhubungan antara berbagai wilayah di dalam sebuah kota atau antar kota, yang mengukur seberapa mudah masyarakat dan barang dapat bergerak dari satu titik ke titik lain. Pengukuran ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti jumlah trayek transportasi yang dilayani dan jarak tempuh dibandingkan dengan jarak yang optimal, serta mencakup berbagai moda transportasi.

Hal ini untuk mengukur efisiensi transportasi dengan menilai seberapa baik jaringan transportasi kota dalam menghubungkan berbagai area, menilai aksesibilitas dengan memastikan bahwa berbagai bagian kota dapat dijangkau dengan mudah, dan merencanakan Pembangunan dengan menjadi dasar untuk perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik di masa depan.

Rasio konektivitas kota berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kota yang terhubung dengan baik akan memudahkan pergerakan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan kualitas hidup, aksesibilitas yang baik memungkinkan masyarakat untuk menjangkau tempat kerja, layanan publik, dan fasilitas lainnya dengan mudah, serta berperan dalam hal integrasi wilayah, yaitu membantu menciptakan integrasi yang lebih baik antar wilayah, baik di dalam kota maupun secara lebih luas.

Jika dikaitkan dengan melalui pendekatan PM 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, menggunakan rumus presentase Pelayanan Angkutan Jalan dengan target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 75%. Perhitungan menggunakan jaringan jalan mengacu referensi yang digunakan pada perhitungan rasio konektivitas Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

Rasio Konektivitas Kota menggunakan formulasi sesuai dengan petunjuk teknis pada penyusunan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), yaitu:

$$\text{Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota} = \frac{(\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}$$

dengan ketentuan:

- 1) IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut);
- 2) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)
- 3) Bobot Trayek atau Lintas :
 - a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1;
 - b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8;
 - c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu), bobot = 0.5
- 4) Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:
 - a) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);

- b) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);
- c) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);
- d) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).

Maka, hasil perhitungan Rasio Konektivitas Kota Salatiga:

IK1

(Angkutan Jalan)

=

(Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut).

= (15 x 1) / 17

= 0,88235

IK2

(Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

=

(Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

= (0 x 0) / 0

= 0

sehingga,

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

=

(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

= (IK1 x 0) + (IK2 x 0)

= (0,88235 x 1) + (0 x 0)

= 0,88235 + 0

= 0,88

Hal ini dihitung berdasarkan kondisi jumlah trayek yang dioperasikan sebanyak 15 trayek dari 17 trayek yang ditetapkan sesuai SK Wali Kota Nomor 551.2/249/2005 Tahun 2005 tentang Trayek, Route dan Kebutuhan Angkutan Kota di Wilayah Kota Salatiga, dan data angkutan kota yang beroperasi, dan sampai dengan sekarang ini, belum adanya perubahan atas trayek tersebut. Tahun 2025 ini adalah sebesar berada di 0.88, s.d. triwulan II, terealisasi sebesar 0.88, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Target atas Rasio Konektivitas Kota pada periode Renstra 2023-2026 ini bersifat non-kumulatif dengan nilai maksimal adalah 1.

Undang-undang UU Nomor 2 Tahun 2022, yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 36 sebagai landasan untuk melaksanakan evaluasi pada ruas jalan. Hal ini sebagai dasar pengawasan ruas jalan kota yang dimaksudkan guna memberikan pelayanan kinerja ruas jalan yang baik. Kinerja lalu lintas kota adalah kemampuan suatu ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas yang diukur dari tingkat pelayanan, kapasitas, dan derajat kejenuhan, serta dapat dievaluasi menggunakan metode seperti MKJI 1997 (atau sekarang PKJI 2014) yang mengacu pada standar tingkat pelayanan jalan. Parameter yang diukur meliputi arus, kecepatan, kepadatan, dan volume lalu lintas untuk menentukan tingkat pelayanan jalan, yang berkisar dari kondisi bebas hambatan hingga macet.

Untuk menilai kinerja lalu lintas, beberapa parameter utama digunakan:

- 1) Arus Lalu Lintas
Jumlah kendaraan yang melewati titik tertentu dalam satuan waktu, diukur dalam kendaraan ringan (skr/jam) setelah dikonversi dari ekivalensi kendaraan ringan.
- 2) Kecepatan
Kecepatan rata-rata kendaraan yang dipengaruhi oleh arus dan kondisi jalan.
- 3) Kepadatan
Jumlah kendaraan yang menempati suatu ruas jalan dalam satuan panjang.
- 4) Volume
Jumlah total kendaraan yang melalui suatu ruas jalan.

Tingkat pelayanan jalan diukur berdasarkan kinerja lalu lintas sering digambarkan dengan tingkat pelayanan (Level of Service/LoS), yang menunjukkan kondisi aliran lalu lintas sebagai berikut:

Tabel II.5
Tingkat pelayanan jalan

V/C Ratio	Level of Service (LoS)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
0,00 – 0,19	A	Arus lancar, volume rendah, kecepatan tinggi. Bebas dan cepat, kendaraan menentukan kecepatannya
0,20 – 0 44	B	Arus stabil, kecepatan dipengaruhi oleh lalu lintas, volume sesuai untuk jalan kota. Hambatan kecil, kondisi stabil.

V/C Ratio	Level of Service (LoS)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
0,45 – 0,74	C	Arus stabil, kecepatan dipengaruhi oleh lalu lintas, volume sesuai untuk jalan kota. Sedikit pembatasan manuver.
0,75 – 0,84	D	Mendekati arus tidak stabil, kecepatan rendah. Terkadang harus memperlambat kecepatan.
0,85 – 1	E	Arus tidak stabil, kecepatan rendah. Volume padat mendekati. Sangat tidak stabil, sering terjadi kemacetan.
> 1	F	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas. Macet total.

Pengukuran kinerja lalu lintas jalan diatur dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) dan PERMEN PUPR No 11/PRT/M/2010 tentang pedoman penyelenggaraan jalan kolektor perkotaan.

Kinerja Lalu Lintas Kota Salatiga:

$$\text{Kinerja Lalu Lintas Kota Salatiga} = \frac{\text{V/C Rasio Ruas Jalan}}{\text{Jumlah Jalan yang Disurvei}}$$

V/C rasio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Berikut ini adalah rincian V/C Ratio di Jalan Kota Salatiga:

Tabel II.6
Kepadatan Lalu Lintas Kota Salatiga

Nama Kecamatan	No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Volume (smp/ jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	LoS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sidomukti	1	Jalan Abdul Wahid	749.02	344.4	1301	0.26	B
	2	Jalan Tentara Pelajar	401.78	640	2827	0.23	B
	3	Jalan Parikesit	960.5	269.4	2480	0.11	A
	4	Jalan Yudistira	456.84	445.7	2157	0.21	B
	5	Jalan Semeru	264.63	588.9	2338	0.25	B
	6	Jalan Tanjung	215.64	171.7	1301	0.13	A
	7	Jalan Bima	721.41	182.3	2089	0.09	A
	8	Jalan Bisma	1231.14	208.2	1301	0.16	A
	9	Jalan Hassanudin	2990.5	918	2558	0.36	B
	10	Jalan Nakula Sadewa	935.3	779.5	2401	0.32	B

Nama Kecamatan	No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Volume (smp/ jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	LoS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkir	1	Jalan Marditomo	1.95	519	1389	0.37	B
	2	Jalan Nanggulan	0.93	1016.8	2323	0.44	B
	3	Jalan Nyai Kopek	0.153	77.2	1995	0.08	A
	4	Jalan Buk Suling	0.383	1136.3	1862	0.61	C
	5	Jalan Butuh	0.354	810.8	2422	0.335	B
	6	Jalan Taman Pahlawan	0.288	1104.4	2068	0.534	C
	7	Jalan Dr. Muwardi	1.074	1314	2648	0.5	C
	8	Jalan Tingkir Raya	2.25	1168.6	2157	0.54	C
	9	Jalan Joko Tingkir	1.012	749.9	2480	0.32	B
	10	Jalan Tritis Rejo	0.835	562.6	1301	0.43	B
Sidorejo	1	Jalan Diponegoro	3379.81	2525.5	3329.49	0.76	D
	2	Jalan Imam Bonjol	3039.58	972.6	2323	0.42	B
	3	Jalan Kartini	664.74	865	3223	0.27	B
	4	Jalan Ki Penjawi	1286.97	407.6	1901	0.31	B
	5	Jalan Langensuko	258.09	237.3	1389	0.17	A
	6	Jalan Monginsidi	427.28	273.9	2435	0.22	B
	7	Jalan Pemuda	143.17	997,6	2951	0,34	B
	8	Jalan Prof. Moh. Yamin	389.13	1322.3	3008	0.44	B
	9	Jalan Taman Sari	230.71	263.2	2440	0.11	A
	10	Jalan Yos Sudarso	500.4	392.9	2323	0.17	A
Argomulyo	1	Jalan Abimanyu	3343,89	287,1	1996,2	0,143	A
	2	Jalan Amarta	1800	692,8	1526,56	0,454	C
	3	Jalan Argo Boga 1	600	813,5	1494,08	0,544	C
	4	Jalan Argo Boga 2	150	816	1996,2	0,408	C
	5	Jalan Argo Sari Raya	3778,31	289	2615,71	0,19	B
	6	Jalan Argo Tunggal	574,05	334,6	1301	0,26	B
	7	Jalan Argorumekso	1058,35	594,2	1996	0,09	B
	8	Jalan Prumasan 1	290	258	1996	0,13	A
	9	Jalan Prumasan 2	900	256	1996	0,13	A
	10	Jalan Sawo	480,27	963,3	1494,08	0,645	C
Jumlah				23.822	85.132	12.08	
Rata-rata				644	2.128	0.31	B

Sehingga Kinerja Lalu Lintas Kota Salatiga adalah:

$$\begin{aligned} \text{Kinerja Lalu Lintas Kota Salatiga} &= \frac{\text{V/C Rasio Ruas Jalan}}{\text{Jumlah Jalan yang Disurvei}} \\ &= \frac{12,08}{40} \\ &= 0.302 \end{aligned}$$

Rasio Kinerja lalu lintas Kota Salatiga pada target Tahun 2025 ini adalah sebesar berada di 0.31, s.d. triwulan II, terealisasi sebesar 0.31, dengan tingkat capaian sebesar 102,58%. Target tersebut pada periode Renstra 2023-2026 ini bersifat non-kumulatif, dan berindikator dengan sifat negatif, serta dengan nilai maksimal adalah 1.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Evaluasi penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2024 dapat dilihat dari capaian IKD, IKU, serta IKM dari target Renstra tahun 2024, dan Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 sebagai berikut:

- 1. Capaian Rasio Izin Trayek, sebesar 95,65%;
- 2. Capaian Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan, sebesar 86,37%;
- 3. Capaian Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum, sebesar 112,48%;
- 4. Capaian Rasio Konektivitas Kota, sebesar 114%;
- 5. Capaian Kinerja Lalu Lintas Kota, sebesar 88,57%;
- 6. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, sebesar 99,54%; dan
- 7. Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022, yaitu sebesar 76,86 dengan kategori BB (Sangat Baik).

berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dari 7 (tujuh) indikator di atas, yang harus dioptimalkan adalah Hasil Evaluasi AKIP agar dapat ditingkatkan lagi manajemen kinerjanya.

Beberapa hal yang menjadi tantangan untuk Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam meningkatkan nilai Hasil Evaluasi AKIP adalah:

- 1. Menjadikan hasil LKjIP sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan internal;
- 2. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Dinas Perhubungan Kota Salatiga tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Dengan mengetahui masalah utama, permasalahan dan akar permasalahan

yang ada, diharapkan dapat membantu dan mempertajam dalam pengambilan kebijakan pelayanan Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam mencapai target dan sasaran RPJMD. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan, antara lain:

1. Permasalahan terkait Sekretariat

- a. Kurang memadainya infrastruktur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan; dan
- b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan dikarenakan belum optimalnya sistem penyusunan dan penugasan perihal dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

2. Permasalahan Bidang Lalu Lintas

- a. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang cukup tinggi setiap tahunnya tanpa diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas/ penambahan jaringan jalan sehingga berdampak pada tingkat kepadatan lalu lintas, polusi udara, konsumsi BBM, dan kenyamanan berlalu lintas;
- b. Penataan parkir yang masih kurang optimal. Terbatasnya ruang parkir baik di tepi jalan maupun tempat khusus parkir, sedangkan kebutuhan parkir terus meningkat seiring bertambahnya mobilitas masyarakat dan kendaraan bermotor. Selain itu, perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan teknologi digital dalam pengelolaan dan transparansi pemungutan retribusi parkir pun masih proses;
- c. Perkembangan dan perubahan pola tata guna lahan yang belum diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas;
- d. Kurangnya fasilitas penunjang perhubungan seperti terminal, halte, rambu-rambu, pembatas jalan, ZoSS (Zona Selamat Sekolah), RASS (Rute Aman Selamat Sekolah), dan infrastruktur yang mendukung keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dan pelayanan angkutan umum;
- e. Masih kurangnya tingkat disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam berlalu lintas; dan
- f. Masih kurangnya sarana pengaturan lalu lintas berbasis teknologi informasi.

3. Permasalahan Bidang Angkutan dan Kelaikan Kendaraan.

- a. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang cukup tinggi di setiap tahunnya dan tingkat *Load factor* angkutan kota yang cukup rendah, dibawah 30% menandakan tingkat minat penggunaan angkutan umum yang rendah;

- b. Masih terdapat 1 (satu) alat uji kendaraan bermotor yang sudah melebihi umur teknis (di atas 18 tahun);
- c. Aplikasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) belum optimal;
- d. Pelayanan perizinan angkutan umum masih manual;
- e. Masih terdapat angkutan umum yang melakukan pelanggaran perizinan dan ketertiban berlalu lintas.
- f. Layanan angkutan umum yang belum dapat mengakses seluruh wilayah Kota Salatiga (4 kecamatan dan 23 kelurahan);
- g. Belum terpenuhinya Terminal Tipe C yang representatif;
- h. Belum tersedianya terminal angkutan barang maupun tempat *loading/unloading* barang;
- i. Masih kurangnya fasilitas henti (halte) untuk angkutan umum;
- j. Tingkat pencemaran lingkungan berupa polusi udara dari emisi gas buang yang semakin besar seiring dengan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya.

Atas permasalahan tersebut, maka beberapa permasalahan pokok Dinas Perhubungan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel II.7

Identifikasi Masalah Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Kualitas layanan angkutan darat dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang layak.	Belum terpenuhinya Terminal Tipe C yang yang representative, dan belum tersedianya terminal barang.	Keterbatasan anggaran.
	Pengelolaan Penyelenggaraan Perparkiran.	Pengelolaan parkir yang masih konvensional.
	Meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi, dan rendahnya tingkat <i>load factor</i> angkutan umum.	Kualitas pelayanan angkutan umum yang belum memadai.
	Rendahnya kepatuhan atas ketentuan perizinan angkutan.	Kurangnya kesadaran pengusaha angkutan barang dan orang dalam pemenuhan perizinan angkutan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan dampaknya yang cukup signifikan bagi kenyamanan masyarakat, kemajuan, dan wajah Kota Salatiga di masa sekarang maupun di masa yang akan

datang dengan tetap mempertimbangkan isu-isu dan dinamika regional, nasional maupun internasional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka isu strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga adalah *“Kualitas layanan angkutan darat dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang layak.”*

2.3 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Review terhadap rancangan Perubahan RKPD 2025 yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Salatiga adalah perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD 2025 dengan hasil analisis kebutuhan berdasarkan realisasi dan atau capaian anggaran dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Selain itu, juga dengan menyesuaikan arah Pembangunan Salatiga tahun 2025, yaitu *“Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan produktif menuju Salatiga yang nyaman dan mandiri”*. Pada urusan perhubungan, prioritas pembangunan bertumpu pada *“Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi”* berdasarkan isu strategis perihal *“Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur untuk masyarakat.”* Hal tersebut guna mendukung kebijakan nasional *“Penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting”*.

Pada Pokok-pokok Pikiran DPRD, prioritas bidang transportasi adalah pengembangan dan peningkatan keandalan system angkutan umum, dan peningkatan karakteristik pelayanan transportasi yang efektif dan efisien. Namun, karena ada suatu hal yang lebih diprioritaskan maka alokasi belanja daerah difokuskan pada prioritas Pembangunan daerah, kebijakan ekonomi nasional untuk transformasi ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan peningkatan nilai tambah SDA serta pemenuhan kebutuhan rutin. Hal ini sesuai dengan arah Pembangunan nasional tahun 2025 yaitu, *“Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”*, serta arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yaitu *“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan SDM yang berdaya saing dan lebih berkarakter”*.

Secara garis besar, perubahan dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran dan kebutuhan lapangan. Untuk penyesuaian di kebutuhan anggaran, Dinas Perhubungan Kota Salatiga menambahkan anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai yang berupa gaji dan tunjangan ASN serta honorarium tenaga harian lepas.

Sedangkan perihal kebutuhan lapangan, beberapa kegiatan mengalami penurunan anggaran dikarenakan adanya beberapa kebutuhan yang sudah cukup terpenuhi sehingga menimbulkan efisiensi anggaran, tanpa mengorbankan kebutuhan. Perubahan anggaran dan kebutuhan tersebut, berdampak pada prioritas Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Terdapat empat Sub Kegiatan dan satu Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga target dan pagu anggaran adalah nol. Secara umum dan rinci, perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga tersebut, baik perubahan target fisik maupun pagu anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.8
 Latar Belakang (Alasan) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
A	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	14,000,000	14,000,000	-	Nihil
1	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	9 Laporan	14,000,000	14,000,000	-	Menyesuaikan target indikator dengan jumlah laporan yang dibutuhkan.
B	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.56 %	95.56 %	5,924,656,783	5,607,747,275	(316,909,508)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
2	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	5,902,156,783	5,579,247,275	(322,909,508)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
									kebutuhan.
3	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	28,500,000	6,000,000	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
C	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	95.65 %	95.65 %	36,328,000	36,328,000	-	Nihil
4	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	36,328,000	36,328,000	-	Nihil
D	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas PDL beserta atribut kelengkapannya	60 paket	60 paket	79,768,000	83,025,000	3,257,000	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
5	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket	79,768,000	83,025,000	3,257,000	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
									kebutuhan.
E	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.56 %	89.56 %	296,696,000	260,834,044	(35,861,956)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
6	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,000,000	4,968,000	(1,032,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
7	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,904,000	10,904,000	-	Nihil
8	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	58,177,000	54,990,900	(3,186,100)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
9	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	73,615,000	63,567,900	(10,047,100)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
10	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	730 Dokumen	8,000,000	2,955,000	(5,045,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
11	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	-	Nihil
12	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	113,448,244	(16,551,756)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
F	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	548,860,000	38,500,000	(510,360,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
13	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	40 Unit	-	38,500,000	38,500,000	Penambahan target fisik, menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang bertambah.
14	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	510,360,000	-	(510,360,000)	Penghapusan Sub Kegiatan guna efiseinsi anggaran, dengan pertimbangan skala prioritas kebutuhan.
G	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	85.56 %	85.56 %	617,746,974	612,421,274	(5,325,700)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
15	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	-	Nihil
16	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	116,788,300	101,272,000	(15,516,300)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
17	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	35,190,600	10,190,600	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
18	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	473,958,674	473,958,674	-	Nihil
H	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	401,583,358	411,020,370	9,437,012	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
19	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	101,934,400	102,992,800	1,058,400	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
20	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	134,648,958	127,360,958	(7,288,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
21	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	80,000,000	80,000,000	-	Penambahan target fisik (pengecatan gedung pengujian kendaraan bermotor), menyesuaikan dengan kebutuhan.
22	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	23 Unit	25,000,000	23,370,000	(1,630,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
23	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60,000,000	77,296,612	17,296,612	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
I	2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian kegiatan Peningkatan Ketrampilan Orientasi Lalu Lintas	90 Persen	90 Persen	76,988,711	-	(76,988,711)	Penghapusan Kegiatan guna efiseinsi anggaran, dengan pertimbangan skala prioritas kebutuhan.
24	2.15.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	76,988,711	-	(76,988,711)	Penghapusan Sub Kegiatan guna efiseinsi anggaran, dengan pertimbangan skala prioritas kebutuhan.
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Rambu- Rambu Terpasang Persentase layanan angkutan darat (IKP)	46 89 Persentase Persen	89 46 Persen Persentase	4,024,392,196	14,312,985,412	(929,392,196)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
J	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	1	1	1,025,142,600	576,651,800	(448,490,800)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
25	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	144,100,000	72,634,000	(71,466,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
26	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	179,042,600	65,467,800	(113,574,800)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
27	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	702,000,000	438,550,000	(263,450,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
K	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	0.95	0.95	288,900,000	11,040,432,126	10,751,532,126	Penambahan anggaran, menyesuaikan

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
									dengan kebutuhan.
28	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	70 Unit	70 Unit	288,900,000	11,040,432,126	10,751,532,126	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
L	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	451,177,500	438,780,000	(12,397,500)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
29	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	341,320,000	336,780,000	(4,540,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
30	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 paket Dokumen	1000 paket Dokumen	25,000,000	25,000,000	-	Nihil
31	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8 Unit	8 Unit	84,857,500	77,000,000	(7,857,500)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
M	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	2,184,172,096	2,206,961,486	22,789,390	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
32	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	-	(30,000,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
33	2.15.02.2.06.0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan							
			Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	-	(40,000,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
34	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	6,328,800	(18,671,200)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
			Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						dengan kebutuhan.
35	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas							
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,730,940,400	1,866,190,500	135,250,100	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
36	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.							
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	358,231,696	334,442,186	(23,789,510)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
N	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Capaian Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0.8	0.8	35,000,000	14,160,000	(20,840,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
37	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor							

NO	KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					ALASAN PERUBAHAN RKPD
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)
		Kabupaten/Kota							
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	14,160,000	(20,840,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
O	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkuta Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Kab/ Kota	90 Persen	90 Persen	40,000,000	36,000,000	(4,000,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
38	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	40,000,000	36,000,000	(4,000,000)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan kebutuhan.
	J U M L A H					12,021,020,022	21,376,861,375	118,305,090,651	

Sedangkan perubahan target Dinas Perhubungan Kota Salatiga atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel II.9
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2024	Target RPD 2025	Realisasi TW II	Capaian TW II (%)	Penyesuaian Target 2025	Alasan Perubahan Target
1	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)								
1)	Rasio Konektivitas Kota	Rasio	0.88	0.71	0.88	123.94	0.88	Jumlah trayek yang dilayani, mendekati jumlah kebutuhan trayek.
2)	Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	0.31	0.45	0.30	132.89	0.31	Upaya Peningkatkan layanan angkutan dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kendaraan pribadi, melalui pengelolaan terminal, uji kendaraan, dan sosialisasi bersama berbagai pihak.
B. Indikator Kinerja Daerah (IKD)								
1)	Rasio Ijin Trayek	Rasio	23.52	21.87	23.48	107,36	23.52	a) Kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum b) Maraknya angkutan berbasis online.
2)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	19.49	22.79	19.21	84.91	19.49	a) Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Salatiga terus meningkat akibat bertambahnya penduduk dan mobilitas, sementara panjang jalan tetap dan layanan angkutan umum belum memadai. b) Dinas Perhubungan, meskipun tidak memiliki kewenangan atas jalan, jumlah penduduk, dan kendaraan, berupaya menekan pertumbuhan kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum.
3)	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	75.44	83.00	25	30,12	75.44	a) Menurunnya jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pegujian kendaraan bermotor berkala lanjutan. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji KIR. b) Tidak adanya sanksi atau pengawasan atas pelanggaran kelaikan kendaraan.

Pada akhirnya, dengan mempertimbangkan pagu anggaran dan prioritas kebutuhan, maka kebutuhan dana/pagu Dinas Perhubungan Kota Salatiga pada Perubahan RKPD adalah sebesar Rp21.376.861.375,00 yang jika dibandingkan dengan besaran pagu pada RKPD 2025 dan APBD 2025, sebagai berikut:

1. Terhadap RKPD Tahun 2025, adalah bertambah sebesar 43,77% atau senilai Rp9.355.841.353,00. Dari semula senilai Rp12.021.020.022,00 menjadi Rp21.376.861.375,00
2. Terhadap APBD Tahun 2025 (DPA Penetapan), adalah bertambah sebesar 7,98% senilai Rp1.705.884.045,00. Dari semula senilai Rp19.670.977.330,00 menjadi Rp21.376.861.375,00.

yang secara rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8-7)
		DINAS PERHUBUNGAN				12,021,020,022	21,376,861,375	9,355,841,353
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12,021,020,022	21,376,861,375	9,355,841,353
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				12,021,020,022	21,376,861,375	9,355,841,353
I	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.28 %	84.28 %	7,996,627,826	7,063,875,963	(1,849,955,249)
A	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	14,000,000	14,000,000	-
1	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	9 Laporan	14,000,000	14,000,000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8-7)
B	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.56 %	95.56 %	5,924,656,783	5,607,747,275	(316,909,508)
2	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	5,902,156,783	5,579,247,275	(322,909,508)
3	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	28,500,000	6,000,000
C	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	95.65 %	95.65 %	36,328,000	36,328,000	-
4	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	36,328,000	36,328,000	-
D	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas PDL beserta atribut kelengkapannya	60 paket	60 paket	79,768,000	83,025,000	3,257,000
5	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	60 Paket	60 Paket	79,768,000	83,025,000	3,257,000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8-7)
E	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.56 %	89.56 %	296,696,000	260,834,044	(35,861,956)
6	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,000,000	4,968,000	(1,032,000)
7	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,904,000	10,904,000	-
8	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	58,177,000	54,990,900	(3,186,100)
9	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	73,615,000	63,567,900	(10,047,100)
10	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	730 Dokumen	8,000,000	2,955,000	(5,045,000)
11	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8-7)
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	-
12	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	113,448,244	(16,551,756)
F	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	548,860,000	38,500,000	(510,360,000)
13	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	30 Unit	40 Unit	-	38,500,000	38,500,000
14	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	4 Unit	510,360,000	-	(510,360,000)
G	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	85.56 %	85.56 %	617,746,974	612,421,274	(5,325,700)
15	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	-
16	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8-7)
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	116,788,300	101,272,000	(15,516,300)
17	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	35,190,600	10,190,600
18	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	473,958,674	473,958,674	-
H	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	401,583,358	411,020,370	9,437,012
19	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	4 Unit	4 Unit	101,934,400	102,992,800	1,058,400
20	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30 Unit	30 Unit	134,648,958	127,360,958	(7,288,000)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8-7)
21	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	2 Unit	80,000,000	80,000,000	-
22	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	23 Unit	23 Unit	25,000,000	23,370,000	(1,630,000)
23	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	60,000,000	77,296,612	17,296,612
I	2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian kegiatan Peningkatan Ketrampilan Orientasi Lalu Lintas	90 Persen	90 Persen	76,988,711	-	(76,988,711)
24	2.15.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	76,988,711	-	(76,988,711)
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Rambu- Rambu Terpasang Persentase layanan angkutan darat (IKP)	46 89 Persent ase Persen	89 46 Persen Persentas e	4,024,392,196	14,312,985,412	(929,392,196)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8-7)
J	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	1	1	1,025,142,600	576,651,800	(448,490,800)
25	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	144,100,000	72,634,000	(71,466,000)
26	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	179,042,600	65,467,800	(113,574,800)
27	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	702,000,000	438,550,000	(263,450,000)
K	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	0.95	0.95	288,900,000	11,040,432,126	10,751,532,126
28	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	70 Unit	70 Unit	288,900,000	11,040,432,126	10,751,532,126
L	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	451,177,500	438,780,000	(12,397,500)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8-7)
29	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	1 Unit	1 Unit	341,320,000	336,780,000	(4,540,000)
30	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	1000 paket Dokumen	1000 paket Dokumen	25,000,000	25,000,000	-
31	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	8 Unit	8 Unit	84,857,500	77,000,000	(7,857,500)
M	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	2,184,172,096	2,206,961,486	22,789,390
32	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	-	(30,000,000)
33	2.15.02.2.06.0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8-7)
			<i>Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan</i>	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	-	(40,000,000)
34	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	6,328,800	(18,671,200)
35	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1,730,940,400	1,866,190,500	135,250,100
36	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>	1 Laporan	1 Laporan	358,231,696	334,442,186	(23,789,510)
N	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Capaian Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0.8	0.8	35,000,000	14,160,000	(20,840,000)
37	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8-7)
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	14,160,000	(20,840,000)
O	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkuta Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Kab/ Kota	90 Persen	90 Persen	40,000,000	36,000,000	(4,000,000)
38	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	2 Unit	2 Unit	40,000,000	36,000,000	(4,000,000)
	J U M L A H					12,021,020,022	21,376,861,375	118,305,090,651

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan lokasi penyebaran adalah di wilayah Kota Salatiga, terdata berupa 2 program yang terdiri dari 15 kegiatan, dan 38 sub kegiatan yang terinci sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program yang berindikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 84,28% ini terdiri dari 8 kegiatan, dengan 23 sub kegiatan, yang terinci sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Indikator keluaran berupa tersusunnya 9 laporan atas capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator keluaran berupa jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 49 orang/bulan.
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Indikator keluaran berupa 1 dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah. Indikator keluaran berupa 2 dokumen pengamanan barang milik daerah, yaitu asuransi atas 5 unit kendaraan dan 1 unit gedung.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Indikator keluaran berupa 60 paket pakaian dinas lapangan (PDL) beserta atribut kelengkapannya.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikator keluaran berupa 1 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Indikator keluaran berupa 1 paket peralatan rumah tangga yang disediakan.

- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Indikator keluaran berupa bahan logistik kantor yang disediakan.
 - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Indikator keluaran berupa 1 paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator keluaran berupa 1 paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu. Indikator keluaran berupa 1 laporan fasilitasi kunjungan tamu.
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator keluaran berupa 1 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Pengadaan Mebel. Indikator keluaran berupa 40 unit mebel yang disediakan.
 - b) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator keluaran berupa 0 unit gedung kantor yang disediakan, hal ini dikarenakan pagu anggaran Rp0,00 hasil dari penyaringan atas prioritas kebutuhan.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator keluaran berupa 1 laporan penyediaan jasa surat menyurat.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator keluaran berupa 1 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator keluaran berupa 1 laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator keluaran berupa 1 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator keluaran berupa 4 unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Indikator keluaran berupa 30

unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator keluaran berupa 2 unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, yaitu pengecatan gedung kantor.
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator keluaran berupa 23 unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Sarana prasarana tersebut adalah genset, Air Conditioning (AC), dan personal computer (PC).

9. Kegiatan Penataan Organisasi dengan sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Indikator keluaran berupa 0 dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan pagu anggaran Rp0,00 hasil dari penyingkapan atas prioritas kebutuhan.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program yang berindikator Persentase Rambu-Rambu Terpasang sebesar 89%, dan Persentase layanan angkutan darat sebesar 29% ini, terdiri dari 6 kegiatan dengan 12 sub kegiatan yang terinci sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Indikator keluaran berupa 1 dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota. Yaitu, naskah akademik Reviu Perda No 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan LLAJ.
 - b) Penetapan Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Indikator keluaran berupa 1 dokumen penetapan kebijakan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.
 - c) Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Indikator keluaran berupa 1 laporan evaluasi (reviu) rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.
- 2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Indikator keluaran berupa 70 unit perlengkapan jalan yang direhabilitasi dan terpelihara, meliputi APILL konvensional, jaringan fiber optic dan kamera ATCS, pemeliharaan rambu lalu lintas dan cermin tikungan, serta terbayarnya penerangan jalan umum (PJU) selama 1 tahun.

3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator keluaran berupa 1 unit sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia, yaitu alat uji lampu.
 - b) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator keluaran berupa tersedianya seribu dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator keluaran berupa 8 unit sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara. Secara spesifik yaitu pemeliharaan 8 unit dan kalibrasi 9 alat uji kendaraan bermotor, serta pemeliharaan sarpras komputer dan jaringan.
4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan. Indikator keluaran berupa 0 laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan. Hal ini dikarenakan pagu anggaran Rp0,00 hasil dari penyaringan atas prioritas kebutuhan.
 - b) Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan. Indikator keluaran berupa 0 dokumen ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan. Hal ini dikarenakan pagu anggaran Rp0,00 hasil dari penyaringan atas prioritas kebutuhan.
 - c) Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator keluaran berupa 1 laporan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - d) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Indikator keluaran berupa 1 dokumen pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.
5. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator keluaran berupa 1 laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. Yaitu, pembayaran honorarium petugas ATCS, dan kajian Kinerja Ruas Jalan Kota Salatiga, dan studi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kolektor dan Sekunder Kota Salatiga. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota. Indikator keluaran berupa 1 laporan inspeksi, audit dan

pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota.

6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator keluaran berupa 2 unit armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, adalah penyediaan 2 unit bus guna program Mudik Gratis pada masa Angkutan Lebaran 1446 H.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebesar Rp21.376.861.375,00 dari APBD semula sebesar Rp19.670.977.330,00 atau mengalami penambahan kebutuhan anggaran sebesar 7,98% senilai Rp1.705.884.045,00. Dan atau bertambah 43,77% senilai Rp9.355.841.353,00 jika dibandingkan dari kebutuhan pagu RKPD 2025. Dana ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atas prioritas nasional *“Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”* dan prioritas daerah *“Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi”*. Secara rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Kebutuhan Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Kota Salatiga
pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	21.376.861.375
I	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.063.875.963
A	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000
1	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.000.000
B	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.607.747.275
2	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.579.247.275
3	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.500.000
C	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.328.000
5	2.15.01.2.03.0003	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.328.000
D	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.025.000
5	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	83.025.000

NO	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
E	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.834.044
6	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.968.000
7	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.904.000
8	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.990.900
9	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.567.900
10	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.955.000
11	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000
12	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.448.244
F	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.500.000
13	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	38.500.000
14	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
G	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.421.274
15	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
16	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.272.000
17	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.190.600
18	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.958.674
H	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.020.370
19	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.992.800
20	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.360.958
21	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000
22	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.370.000
23	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.296.612
I	2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	-
24	2.15.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0
II.	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.312.985.412
J	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	576.651.800
25	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	72.634.000

NO	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
26	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	65.467.800
27	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	438.550.000
K	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.040.432.126
28	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	11.040.432.126
L	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	438.780.000
29	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	336.780.000
30	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000
31	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	77.000.000
M	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.206.961.486
32	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0
33	2.15.02.2.06.0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	0
34	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6.328.800
35	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.866.190.500
36	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	334.442.186
N	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	14.160.000
37	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	14.160.000
O	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000
38	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000
J U M L A H			21.376.861.375

Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025, yang dirangkai dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut di atas, dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.	Rasio Ijin Trayek	%	24,37	24,37	24,37	24,37	21,87	21,87	21,87
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79	24,79	24,79	24,79	22,79	22,79	22,79
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82	82	82	82	83	83	83

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
Meningkatkan Kualitas lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	1. Rasio Konektivitas	Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio Ijin Trayek	Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Persentase layanan angkutan darat (IKP)
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum		
	2. Kinerja lalu lintas kota		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan		Prosentase Rambu rambu terpasang (IKP)

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.	Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, pengembangan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan angkutan massal.	Peningkatan pelayanan perhubungan dengan perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga keselarasan. Keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 serta memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Perubahan dokumen RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara wali kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut, dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian tujuan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi bagian penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kota Salatiga pada tahun 2025.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SALATIGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							12,021,020,022.00	19,670,977,330.00	21,376,861,375.00	9,355,841,353.00							9,241,672,577.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12,021,020,022.00	19,670,977,330.00	21,376,861,375.00	9,355,841,353.00							9,241,672,577.00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							12,021,020,022.00	19,670,977,330.00	21,376,861,375.00	9,355,841,353.00							9,241,672,577.00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84.28 %	84.28 %	7,996,627,826.00	5,917,431,504.00	7,063,875,963.00	-1,849,955,249.00							6,146,672,577.00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00				05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan		14,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	9 Laporan	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			14,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				95.56 %	95.56 %	5,924,656,783.00	4,111,727,272.00	5,607,747,275.00	-316,909,508.00				05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan		4,541,962,577.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/ bulan	49 Orang/ bulan	5,902,156,783.00	4,083,227,272.00	5,579,247,275.00	-322,909,508.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			4,509,462,577.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00	6,000,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			32,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi/ Barang Milik Daerah SKPD				95.65 %	95.65 %	36,328,000.00	36,328,000.00	36,328,000.00	0.00				05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan		25,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	36,328,000.00	36,328,000.00	36,328,000.00	0.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			25,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas PDL beserta atribut kelengkapannya				60 paket	60 paket	79,768,000.00	83,025,000.00	83,025,000.00	3,257,000.00				05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan		100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	79,768,000.00	83,025,000.00	83,025,000.00	3,257,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				89.56 %	89.56 %	296,696,000.00	488,252,788.00	260,834,044.00	-35,861,956.00				05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan		239,960,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00	4,968,000.00	-1,032,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			6,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,904,000.00	10,904,000.00	10,904,000.00	0.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			7,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58,177,000.00	59,838,900.00	54,990,900.00	-3,186,100.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			37,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	73,615,000.00	188,143,400.00	63,567,900.00	-10,047,100.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			80,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	730 Dokumen	8,000,000.00	8,000,000.00	2,955,000.00	-5,045,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			1,110,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			8,350,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	130,000,000.00	205,366,488.00	113,448,244.00	-16,551,756.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	548,860,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00	-510,360,000.00			-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan		390,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	40 Unit	0.00	38,500,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	NON URUSAN							12,021,020,022.00	19,670,977,330.00	21,376,861,375.00	9,355,841,353.00							9,241,672,577.00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12,021,020,022.00	19,670,977,330.00	21,376,861,375.00	9,355,841,353.00							9,241,672,577.00	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12,021,020,022.00	19,670,977,330.00	21,376,861,375.00	9,355,841,353.00							9,241,672,577.00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							12,021,020,022.00	19,670,977,330.00	21,376,861,375.00	9,355,841,353.00							9,241,672,577.00	
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	510,360,000.00	0.00	0.00	-510,360,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			390,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah				85.56 %	85.56 %	617,746,974.00	613,578,074.00	612,421,274.00	-5,325,700.00			-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan		452,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			2,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	116,788,300.00	101,272,000.00	101,272,000.00	-15,516,300.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			70,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000.00	36,347,400.00	35,190,600.00	10,190,600.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			20,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	473,958,674.00	473,958,674.00	473,958,674.00	0.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			360,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	401,583,358.00	416,020,370.00	411,020,370.00	9,437,012.00			-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan		328,250,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	101,934,400.00	102,992,800.00	102,992,800.00	1,058,400.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			84,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	134,648,958.00	132,360,958.00	127,360,958.00	-7,288,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			198,750,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			20,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit	25,000,000.00	23,370,000.00	23,370,000.00	-1,630,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			25,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60,000,000.00	77,296,612.00	77,296,612.00	17,296,612.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian kegiatan Peningkatan Ketrampilan Orientasi Lalu Lintas				90 Persen	90 Persen	76,988,711.00	116,000,000.00	0.00	-76,988,711.00			-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan		55,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	76,988,711.00	116,000,000.00	0.00	-76,988,711.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			55,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Rambu- Rambu Terpasang Persentase layanan angkutan darat (IKP)				46 89 Persent ase Persen	89 46 Persen Persentas e	4,024,392,196.00	13,753,545,826.00	14,312,985,412.00	-929,392,196.00							3,095,000,000.00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota				100 %	100 %	1,025,142,600.00	788,322,000.00	576,651,800.00	-448,490,800.00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	masyarakat salatiga		250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	144,100,000.00	92,634,000.00	72,634,000.00	-71,466,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	179,042,600.00	157,787,000.00	65,467,800.00	-113,574,800.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			125,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	702,000,000.00	537,901,000.00	438,550,000.00	-263,450,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			125,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota				95 %	95 %	288,900,000.00	10,188,351,730.00	11,040,432,126.00	10,751,532,126.00			-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Masyarakat Kota Salatiga		350,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				70 Unit	70 Unit	288,900,000.00	10,188,351,730.00	11,040,432,126.00	10,751,532,126.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUM S I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			350,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	451,177,500.00	442,200,000.00	438,780,000.00	-12,397,500.00			-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Salatiga		120,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	341,320,000.00	340,200,000.00	336,780,000.00	-4,540,000.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			0.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 paket Dokumen	1000 paket Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				8 Unit	8 Unit	84,857,500.00	77,000,000.00	77,000,000.00	-7,857,500.00	Kota Salatiga, Argomulyo, Tegalrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			70,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	2,184,172,096.00	2,269,172,096.00	2,206,961,486.00	22,789,390.00			-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Masyarakat Kota Salatiga		2,295,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			30,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan																		
			Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000.00	0.00	0.00	-40,000,000.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			40,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00	6,328,800.00	-18,671,200.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			25,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,730,940,400.00	1,885,940,400.00	1,866,190,500.00	135,250,100.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			1,800,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	358,231,696.00	358,231,696.00	334,442,186.00	-23,789,510.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			400,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Capaian Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				80 %	80 %	35,000,000.00	25,500,000.00	14,160,000.00	-20,840,000.00			-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			35,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	35,000,000.00	25,500,000.00	14,160,000.00	-20,840,000.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			35,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkuta Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Kab/ Kota				90 Persen	90 Persen	40,000,000.00	40,000,000.00	36,000,000.00	-4,000,000.00			-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			45,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	40,000,000.00	40,000,000.00	36,000,000.00	-4,000,000.00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi 05 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi			45,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								12,021,020,022.00	19,670,977,330.00	21,376,861,375.00	118,305,090,651.00							9,241,672,577.00	